



# **Menata Ulang Sistem Registrasi Penduduk di Indonesia Untuk Mendukung Program SDGs**

**Disampaikan Pada Seminar  
Lembaga Penelitian SMERU,  
Tanggal 2 Februari 2016**

**Prof. Dr. Irdam Ahmad, M.Stat  
Dosen Uhamka dan Anggota  
Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta**



## **Latar Belakang**

- Secara umum, ada 3 sumber data kependudukan, yaitu Sensus Penduduk (diadakan 10 tahun sekali), Survei Penduduk (pada tahun-tahun tertentu) dan Registrasi Penduduk (setiap hari).
- Selama ini, data penduduk yang digunakan selalu mengacu pada hasil Sensus dan Survei Penduduk yang dilaksanakan oleh BPS, karena sistem registrasi penduduk (pencatatan kelahiran, kematian dan pindah datang) belum berjalan secara efektif dan belum mencakup seluruh penduduk Indonesia.
- Jika pelaksanaan registrasi penduduk bisa berjalan seperti yang diharapkan, data registrasi penduduk akan sangat bermanfaat untuk mendukung program pembangunan di Indonesia, karena pencatatannya dilakukan setiap hari, sehingga data bisa diperoleh secara real time

## Latar Belakang

- Ketika program MDGs selesai akhir tahun 2015, beberapa data pada MDGs seperti Infant Mortality Rate (IMR), Maternal Mortality Rate (MMR), dll, hanya bisa disajikan sampai dengan data tahun 2012 (SDKI) atau 2013 (Susenas). Padahal data-data tersebut seharusnya bisa disajikan untuk tahun 2015 melalui Registrasi Penduduk.
- Untuk program SDGs, yang baru dimulai tahun ini, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah untuk menata ulang sistem Registrasi Penduduk sebagai alternatif sumber data program SDGs, disamping data BPS lainnya.
- Kalau sistem Registrasi Penduduk bisa dilaksanakan dengan baik, ada koordinasi diantara semua pemangku kepentingan, dan datanya bisa diolah secara online, maka data IMR, MMR, dan indikator demografi lainnya untuk keperluan program SDGs, dan perencanaan pembangunan berbagai sektor, bisa diperoleh setiap saat secara real time dan merupakan data populasi, yang tentu saja lebih akurat.

## Tujuan Penelitian

- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Registrasi Penduduk yang berjalan pada saat ini di Provinsi DKI Jakarta. Dari penelitian ini, diharapkan diperoleh suatu sistem registrasi penduduk yang baik, sedemikian rupa sehingga bisa dijadikan percontohan untuk provinsi lain di seluruh Indonesia.
- Mendisain Sistem Informasi Pencatatan dan Pengolahan Data Kelahiran dan Kematian, yang terhubung secara online diantara semua pemangku kepentingan sehingga berbagai indikator demografi seperti TFR, IMR, MMR, dll, bisa diperoleh secara real time.



## Manfaat Registrasi Penduduk

Tersedianya berbagai indikator demografi secara real time, akan sangat bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan program SDGs dan perencanaan pembangunan berbagai sektor, seperti; kesehatan, KB, pendidikan, dll.

Bagi masyarakat, jika pencatatan kelahiran dan kematian bisa dilakukan dengan baik dan terhubung secara online, semua penduduk DKI Jakarta akan memperoleh kemudahan untuk memiliki berbagai dokumen kependudukan yang mereka butuhkan.



## Metodologi Penelitian

- Mengunjungi beberapa kantor kelurahan untuk mengetahui sistem pencatatan kelahiran (pembuatan NIK bagi bayi yang baru lahir), pencatatan kematian (surat keterangan kematian) dan pencatatan pindah datang
- Mengunjungi beberapa kantor Kecamatan untuk mengetahui proses pembuatan Akta Kelahiran, baik bagi bayi yang berumur kurang dari 60 hari maupun yang berumur lebih dari 60 hari
- Mengunjungi beberapa Puskesmas, Rumah Sakit, dan Rumah Bersalin untuk mengetahui proses pencatatan kelahiran (pembuatan surat kenal lahir) dan pencatatan kematian untuk visum penyebab kematian.
- Mengunjungi Kantor Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) untuk mengajak pengurus IBI, Bidan Praktek dan Bidan Desa dalam membantu pembuatan Akta Kelahiran bayi baru lahir, baik di DKI Jakarta maupun diluar DKI Jakarta
- Mengunjungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, dan BPMPKB, untuk berdiskusi tentang sistem informasi pencatatan kelahiran dan kematian yang terhubung secara online antara Puskesmas, Rumah Sakit, dan Rumah Bersalin, dengan Dinas Kesehatan, BPMPKB, Dinas Dukcapil, Bappeda, dll.

## Temuan Penelitian; Pencatatan Kelahiran

- Ada sedikit perbedaan pembuatan Akta Kelahiran antara wilayah Jakarta Pusat dengan Jakarta Timur. Di Jakarta Pusat, sebelum membuat Akta Kelahiran di Kantor Kecamatan, bayi yang baru lahir dibuatkan NIK terlebih dahulu di Kantor Kelurahan dan di print pada Kartu Keluarga.
- Kelemahan dari sistem ini; ada sebagian warga yang tidak mengurus Akta Kelahiran di Kantor Kecamatan setelah memperoleh NIK dan nama bayinya sudah masuk pada Kartu Keluarga yang bersangkutan. Mungkin karena tidak mengetahui bahwa membuat Akta Kelahiran gratis. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ada beberapa bidan di Rumah Bersalin yang belum mengetahui bahwa membuat Akta Kelahiran gratis.
- Di Jakarta Timur, petugas Dukcapil di RS Budiasih bisa membuat Akta Kelahiran bagi bayi yang lahir disana terlebih dahulu, dan sesudah itu, baru orang tuanya membuatkan NIK di Kantor Kelurahan sesuai dengan alamat KTP nya. Dengan cara ini, semua bayi yang lahir di RS Budiasih bisa mempunyai Akta Kelahiran, sebelum mempunyai NIK.
- Perbedaan lainnya adalah; untuk yang berumur lebih dari 60 hari, di Jakarta Pusat dilayani oleh Kantor Kecamatan, sedangkan di Jakarta Timur, warga harus mengurus di Kantor Suku Dinas Dukcapil Jakarta Timur

## Temuan Penelitian; Pencatatan Kelahiran

- Untuk memastikan semua bayi mempunyai Akta kelahiran, mulai Oktober 2015, Sudin Dukcapil Jakarta Pusat akan melayani pembuatan Akta Kelahiran di kelurahan, dimana warga mengisi formulir di kelurahan dan petugas kelurahan akan mengantarkan formulir tersebut ke Kantor Kecamatan untuk dibuatkan Akta Kelahiran, dan setelah selesai warga bisa mengambil Akta Kelahiran anaknya di Kelurahan.
- Dari data yang terdapat pada formulir pembuatan Akta Kelahiran yang sudah terhubung secara online, Dinas Dukcapil DKI Jakarta menghitung Crude Birth Rate (CBR) = 15,67 tahun 2014 yang berarti ada 15,67 kelahiran per 1000 penduduk.
- Perlu diketahui, data CBR tersebut tidak mewakili seluruh bayi yang lahir di Jakarta, karena pembuatan Akta Kelahiran berdasarkan alamat KTP orang tua, sehingga bayi yang lahir di Jakarta, tetapi KTP orang tuanya diluar Jakarta tidak termasuk didalamnya. Sebaliknya, bayi yang lahir diluar Jakarta (12 % dari seluruh kelahiran), tetapi orang tuanya mempunyai KTP Jakarta, termasuk CBR Jakarta. Data jumlah penduduk yang digunakan juga hanya yang mempunyai KK/KTP DKI Jakarta.

## Temuan Penelitian; Pencatatan Kematian

- Selama ini, pencatatan kematian dilakukan oleh RS untuk kematian yang terjadi di RS tersebut, dan oleh Puskesmas untuk kematian diluar RS (kematian dirumah). Tujuan utama pencatatan kematian adalah untuk mengetahui penyebab kematian. Sedangkan kematian karena kecelakaan atau kriminal, datanya ada di Kantor Polisi.
- Dari surat kematian yang dikeluarkan oleh RS/Puskesmas tersebut, keluarga almarhum meminta surat kematian dengan mengisi formulir kematian di kantor kelurahan, yang juga sudah terhubung secara online dengan Dinas Dukcapil, untuk keperluan pemakaman jenazah di DKI Jakarta.
- Dari data yang terdapat pada surat kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan tersebut, Dinas Dukcapil menghitung IMR (Infant Mortality Rate) tahun 2014, yaitu sebesar 7,86, yang berarti terdapat 7-8 kematian bayi (berusia kurang dari setahun) untuk setiap 1000 kelahiran hidup.
- Tetapi karena data kelahiran maupun kematian bayi tersebut belum mencakup semua kelahiran dan kematian yang terjadi di DKI Jakarta, maka kita harus hati-hati menganalisis data IMR tersebut. Sesuai peraturan, jika orang tua bayi yang lahir maupun yang meninggal tersebut tidak memiliki KTP DKI Jakarta, maka tidak termasuk dalam penghitungan IMR tersebut. Sebaliknya kelahiran atau kematian bayi terjadi diluar DKI Jakarta, tetapi orang tuanya memiliki KTP DKI Jakarta, akan dicatat sebagai kelahiran dan kematian di DKI Jakarta.

## Indikator SDGs dari Data Registrasi Penduduk

Tujuan 3; Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk di Segala Usia

Target 3A; Mengakhiri kematian yang dapat dicegah dengan kematian anak setidaknya 20 per 1000 kelahiran, mengurangi kematian ibu menjadi setidaknya 40 kematian per 100.000 kelahiran hidup, dan mengurangi kematian akibat penyakit penduduk berumur kurang dari 70 tahun setidaknya 30 persen dari angka pada tahun 2015.

- Angka kematian neo natal
- Angka kematian bayi
- Angka kematian balita
- Rasio dan angka kematian ibu (hamil dan melahirkan)
- Angka kematian HIV
- Angka kematian terkait TBC
- Angka kematian terkait malaria
- Probabilitas kematian antara usia tepat 30 tahun dan 70 tahun dari penyakit jantung, kanker, diabetes, dan penyakit pernapasan kronis

## Indikator SDGs dari Data Registrasi Penduduk

- Tujuan 5; Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan
- Target 5A; Mencegah dan Menghilangkan kekerasan terhadap individu, khususnya perempuan dan anak
- Presentase wanita berusia 20-24 tahun yang telah menikah atau menikah sebelum berusia 18 tahun
- Target 5C: Mencapai kesehatan seksual dan reproduksi dengan semua hak-haknya dan mensosialisasikan program penurunan kelahiran dengan cara yang efisien dan sukarela
- Angka kelahiran total (TFR)

## Beberapa Rumus Indikator Demografi Untuk SDGs

Angka Kematian Neo Natal

$$AK \text{ Neo-Natal} = \frac{D_{0-1 \text{ bln}}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \times K$$

Angka Kematian Bayi

$$AKB = \frac{D_{0-1 \text{ th}}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \times K$$

Angka Kematian Balita

$$AK \text{ Balita} = \frac{D_{0-4 \text{ thn}}}{\sum P_{0-4 \text{ thn}}} \times K$$

Dimana :  $K = 1000$

## Beberapa Rumus Indikator Demografi Untuk SDGs

Angka Kematian Ibu

K = 100.000

$$AKI = \frac{\sum \text{Kematian Ibu}}{\sum \text{Kelahiran Hidup}} \times K$$

Total Fertility Rate (TFR)

| Kelompok Umur   | Penduduk Wanita | Kelahiran Bayi | ASFR per 1.000 wanita |
|---|-----------------|----------------|-----------------------|
| 15-19   | 3.755           | 199            | 52,99                 |
| 20-24   | 3.675           | 365            | 99,32                 |
| 25-29   | 4.430           | 366            | 82,62                 |
| 30-34   | 3.779           | 267            | 70,65                 |
| 35-39   | 3.303           | 163            | 49,35                 |
| 40-44   | 2.644           | 61             | 23,07                 |
| 45-49   | 1.944           | 14             | 7,20                  |
| $\sum \text{ASFR} = 385,20$                                 |                 |                |                       |
| $\text{TFR} = 5 \sum \text{ASFR} = 5 \times 385,20 = 1.926$ |                 |                |                       |

## Rekomendasi

- Agar data registrasi penduduk bisa digunakan untuk mendukung program SDGs, pemerintah, bersama-sama dengan DPR, harus merevisi kembali UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang direvisi tahun 2013, agar pencatatan kelahiran dan kematian dilakukan berdasarkan azas dimana peristiwa tersebut terjadi.
- Perlu dilakukan kerjasama antara antara Kementerian Dalam Negeri, yang bertanggungjawab terhadap registrasi penduduk, dengan Kementerian Kesehatan, BKKBN dan Bappenas, dalam mendisain sistem informasi pengumpulan dan pengolahan data registrasi penduduk, sehingga data yang dikumpulkan bisa memenuhi kebutuhan data untuk SDGs dan perencanaan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun daerah.

## Rekomendasi

- Di Provinsi DKI Jakarta, walaupun sistem informasi pencatatan kelahiran dan kematian sudah terhubung secara online antara semua kantor kel/kec dengan Dinas Dukcapil, tetapi data yang diperoleh belum valid, karena masih terdapat kesalahan. Karena itu, sistem informasi pengolahan datanya perlu didisain ulang, sehingga berbagai indikator kelahiran (CBR, TFR, dll) dan indikator kematian (IMR, MMR, dll) yang diperoleh bisa dipercaya.
- Di provinsi lainnya, karena pengolahan datanya dilakukan pada tingkat kabupaten/kota, maka untuk memperoleh data kelahiran dan kematian pada tingkat provinsi, sistem informasi yang akan didisain juga harus menghubungkan antara Dinas Dukcapil seluruh Kab/Kota dengan Dinas Dukcapil Provinsi yang bersangkutan.

## Rekomendasi

- Penataan ulang sistem registrasi penduduk sebaiknya tidak hanya untuk mendukung program SDGs, tetapi perlu dilakukan secara menyeluruh, misalnya untuk memastikan agar semua anak Indonesia bisa memiliki Akta Kelahiran, dan semua penduduk Indonesia usia 17 tahun keatas bisa memiliki kartu identitas seperti eKTP dan Kartu Keluarga.
- Data dari Kemendagri menunjukkan bahwa dari sekitar 83 juta anak Indonesia, baru sekitar 31 % yang mempunyai Akta Kelahiran (Kompas, 30 September 2015, hal 12). Data lainnya menunjukkan bahwa lebih dari 30 juta penduduk Indonesia usia 17 tahun keatas belum memiliki eKTP (Kompas, 31 Oktober 2015, hal 2).





# TERIMA KASIH



## CV Ringkas

Nama : Prof. Dr. Irdam Ahmad, M.Stat

Alamat : Jln. Johar Baru V, No. 33, Jakarta Pusat, HP : 0816.136.1758,  
email: irdam\_ahmad@yahoo.com

### Pendidikan :

- Bachelor of Statistics, Akademi Ilmu Statistik (1979)
- Master of Statistics, University of the Philippines (1991)
- Doktor, Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, UNJ (2011)

### Pekerjaan ;

- Peneliti pada Badan Pusat Statistik (1979-1984 dan 1997-2005)
- Peneliti pada Center for Policy and Implementation Studies, CPIS (1984-1997)
- Dosen PNS diperbantukan di STEKPI (2005-2012) dan Uhamka (2012-skr)
- Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta (2013-sekarang)
- Dosen Mata Kuliah ; Statistik, Demografi, Metodologi Penelitian, dll, pada beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, sejak 1991-sekarang
- Guru Besar dalam bidang Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Uhamka 2013 - sekarang